

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI PANTAI SETOKOK KELURAHAN SETOKOK KECAMATAN BULANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Disusun dan Diajukan Oleh:

HARDIANSYAH DARWIS

L241 14 309



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI PANTAI SETOKOK KELURAHAN SETOKOK KECAMATAN BULANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Disusun dan Diajukan Oleh:

HARDIANSYAH DARWIS

L241 14 309



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Bahari Di Pantai Setokok Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Disusun dan Diajukan Oleh :

Hardiansyah Darwis

L241 14 309

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 15 Juni 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan Kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si

Dr. Andi Amri, S.Pi, M.Sc., Ph.D

NIP. 19590707 198503 2002

NIP.19700307 199703 1 003

Ketua Program Studi

Ketua Program Studi

Sosial Ekonomi Perikanan



Dr. Hanzan, S.Pi, M.Si

NIP. 19710126 200112 1 001

Tanggal Pengesahan :2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardiansyah Darwis
Nim : L24114309
Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari di pantai Setokok Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perubahan tersebut.

Makassar 15 Juni 2021

Yang menyatakan



Hardiansyah Darwis

PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardiansyah Darwis

Nim : L24114309

Program Studi : Sosial Ekonomi Perikanan

Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi Sebagian atau keseluruhan ini Skripsi/Tesis/Desertasi pada jurnal atau forum ilmiah harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan univerisitas hasanuddin sebagai institutnya. Apabila dalam waktu sekurang kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan skripsi sya tidak melakukan publikasi dari Sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap dilakukan.

Makassar, 15 Juni 2021

Mengetahui

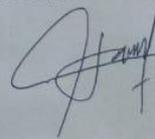
Ketua Program Studi



Dr. Hamzah, S.Pi., M.Si

NIP. 19710126 2001 12 1001

Penulis



Hardiansyah Darwis

NIM : L24114309

ABSTRAK

Hardiansyah Darwis. L24114309. "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Bahari di Pantai Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau" dibimbing oleh **Mardiana E. Fachry sebagai** Pembimbing Utama dan **Andi Amri** sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pengelolaan wisata pantai Setokok, Tingkat Partisipasi dan manfaat pengelolaan wisata pantai Setokok yang dirasakan masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada bulan Juni-September 2020 di Obyek Wisata Pantai Setokok, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *survey* dengan menggunakan alat bantu berupa kuisisioner metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kombinasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan kuisisioner dan metode skala *likert* sistem scoring (angka). Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam implementasi pantai Setokok dikelola secara kekeluargaan dengan partisipasi masyarakat lokal. Pengelolaan pantai setokok merupakan pengelolaan secara mandiri, yang melibatkan peran serta masyarakat lokal, pemilik lahan berperan sebagai investor dan penyedia wisata, pengelola fasilitas dan daya Tarik wisata, melaksanakan promosi, pemberi upah dan mengatur keluar masuknya pedagang, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas kebersihan lingkungan lokasi obyek wisata dan aktivitas pengunjung, masyarakat berperan sebagai pekerja, pedagang dan penyedia jasa serta pengelola fasilitas wisata. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata yaitu partisipasi dalam ide atau buah pikiran, keterampilan dan tenaga. Sedangkan untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai Setokok adalah berada pada kategori terlibat dengan jumlah skor 49,37%. Manfaat pengelolaan pantai Setokok yang dirasakan masyarakat lokal yaitu peluang dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, perubahan kebiasaan masyarakat.

Kata kunci : *Pariwisata, Pengelolaan, Partisipasi, Masyarakat*

ABSTRACT

Hardiansyah Darwis. L24114309. "Analisis of Community Participation in the Mngement of Marine Tourism on the Setokok Beach, Setokok Village, Bulangng Subdistrict, Batam City, Riau Island Province" guided by **Mardiana E. Fachry** sebagai as Main Advisor and **Andi Amri** as Member Advisor.

This study aims to determine the form of Setokok beach tourism management, The level of participation and benefits of Setokok beach tourism management is felt by the local community. This research was conducted for 3 months in June-September 2020 at Setokok Beach Tourism Object, Setokok Village, Bulang District, Batam City, Riau Islands Province. The type of research used is survey research using a tool in the form of a questionnaire. The method used in this study is a combination of quantitative and qualitative research methods. The data analysis technique used a qualitative descriptive analysis with the help of a questionnaire and a Likert scale method scoring system (numbers). Based on the results of the research that in implementing Setokok beach it is managed in a family manner with the participation of the local community. The management of the seokok beach is independent management, which involves the participation of local communities, the land owner acts as an investor and tourism provider, the manager of tourism facilities and attractions, carries out promotions, provides wages and regulates the entry and exit of traders, the government only acts as a supervisor of the environmental cleanliness of the location tourism objects and visitor activities, the community plays a role as workers, traders and service providers as well as managers of tourist facilities. The form of community participation in tourism management is participation in ideas or thoughts, skills and energy. Whereas the level of community participation in the management of Setokok beach tourism is in the involved category with a total score of 49,37%. The benefits of managing Setokok beach that are felt by the local community are job opportunities and opportunities, increased income, changes in community habits.

Keywords : *Tourism, management, participation, community*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam senatiasa tucurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai **Analisis Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari di pantai Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bualng Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terkhusus untuk kedua orang tua **Darwis dan Hajrah** tercinta yang telah menjadi orang tua yang sangat sabar dalam menghadapi semua keluh kesah penulis, serta telah memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis terima kasih karena telah menjadi canda dan tawa, serta penguat bagi penulis, penulis tidak mampu melangkah sejauh ini tanpa bimbingan ibu dan ayah tercinta.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Ir . Mardiana E. Fachry, M.Si** selaku pembimbing ketua dan Bapak **Andi Amri S.Pi., M.Sc., Ph.D.**, selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. St. Ir. Aisyah Fahrums, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Rohani Ambo Rappe, M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Ir. Gunarto Latama, M.Sc** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si** dan Ibu **Arie Syahrini Cangara, S.Pi., M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun.
5. Segenap **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Rio selaku **Sekretaris dari Pantai Setokok**, dan Lurah Setokok bapak Budi terima kasih atas bantuan dan keramahan kepada penulis selama proses pengambilan data penelitian ini.
7. Kepada teman-teman **GLAD14TOR SEP 2014**, Marwah Erfiana, Lenny Lesviani dan keluarga, Eparilla Pattalongi, St. Rahmi, Andi Rezky Nopiana, Asmaul HusnahJaya, Riski Sari, Mardawati, Hasnawati dan keluarga Novianty Noer Riska Amalia, Rini. S, Depri Setiawan Bastin dan keluarga, Hasan Walinono, Nurfadillah, Andi Agus Trianto, Agung Raka Pratama, Haidir, Fitri Ayu Lestari, Muhammad Aidil, Indah Sari Utami dan Keluarga, Arliana Asri dan Keluarga, Muhammad Ashari, Harmawati, Wa ode Sri Rusna, Rahmat Wally, Amartiwi Raihana, Fhifi Lamuna, Hardianty Askar, Riskiyani, St. Nurul Azizah M, *Trista Nia Dea Paramita*, Hardiansyah Darwis, Mustakim, Khairun Annisa, Fitra Jaya, Auly Awaliya Basit dan Keluarga, Rizka Maulidyah M, Muhammad Asri Triyadi Saputra, Musthain Asbar H, Mihrawati Amin, Andi Utami Batari, Fikram Ahyar Barli, Arwita Irawati, Nur Eka Asmawati, Nurul Annisa Putri, Aulia Maghfira Ichwan, Iqra Muhammaddin Ashari, Tubagus Andy Lomo Pakpahan, Sari Multazam, Mila Sri Wulandari, Nirwati, Evi Anggraini terima kasih atas kekompakan dan solidaritasnya selama ini.
8. Kepada teman-teman pengurus **KOPMA TAHUN BUKU 2016** Muhammad Idris, Hardianti Marding, Muhammad Irsan R, Zulkarnain, Andi Vebrianti, Zulfidah, Reski Amalia, Risma M Riska, Febri, Amran Maulana, Andi Cita Mutahharah, Muhammad Iqbal, atas kekompakan dan solidaritasnya selama ini
9. Untuk teman KKN Reguler Kabupaten Maros Kecamatan Marusu Batch 96.
10. Anggota KN. Pulau Marore 322 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Dengan kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan segala kritik serta saran membangun sangat diharapkan

dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hardiansyah Darwis, lahir di Pangkep pada tanggal 17 Mei 1996. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Ayah Darwis dan Hajrah. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai pada tahun 2002, penulis memasuki Sekolah Dasar di SD Negeri 25 Taraweang Kabba kecamatan Minasatene dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan lagi ke tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pangkajene dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah Bungoro-Pangkep dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri yakni di Universitas Hasanuddin Makassar tepatnya di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan, dengan Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, melalui jalur SBMPTN, dengan mendapatkan Beasiswa Bidikmisi

Aktivitas penulis selama menjadi mahasiswa adalah mahasiswa aktif selama mengikuti perkuliahan dan ikut aktif dalam berbagai kepanitiaan dan organisasi dalam lingkup fakultas dan lingkup universitas. Penulis aktif dalam Badan Pengurus Harian Divisi Kajian Strategis Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEI UNHAS) periode tahun 2017 – 2018. Penulis pernah menjadi Staf Bidang Litbang dan Pa di Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) Periode 2015-2016. Penulis pernah menjadi Kabid Litbang dan Pa di Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) Periode 2016-2017. Penulis pernah menjadi Anggota Leader di Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) Periode 2018-2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN AUTHORSHIP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pariwisata	6
B. Potensi Pariwisata	7
C. Wisata Bahari	7
D. Komponen-Komponen Wisata	10
E. Partisipasi Masyarakat.....	12
a. Pengertian Partisipasi.....	12
b. Pengertian Masyarakat.....	13
c. Pengertian Partisipasi Masyarakat	15
d. Bentuk Partisipasi.....	16
e. Tingkat Partisipasi Masyarakat	17
f. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat.....	18
F. Konsep Objek Wisata	20
G. Pengelolaan Objek Wisata.....	22
H. Dampak Pariwisata	24
I. Penelitian Terdahulu	25
J. Kerangka Berfikir	26

III. METODE PENELITIAN.....	28
A. Waktu Dan Tempat.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Metode Pengambilan Sampel.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
A. Definisi Operasional.....	32
IV. HASIL.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Keadaan Geografis.....	33
2. Kontur Tanah.....	33
3. Iklim.....	33
4. Keadaan Demografi.....	34
5. Sarana dan Prasarana.....	35
6. Keadaan Umum Responden.....	35
B. Bentuk Pengelolaan Pantai Setokok.....	38
a. Sejarah Wisata Bahari Pantai Setokok.....	38
b. Perencanaan pembangunan wisata pantai Setokok.....	39
c. Perizinan.....	39
d. Fasilitas.....	40
e. Aktivitas Wisata.....	41
f. Peran Pemilik Lahan dalam Pengelolaan Wisata Pantai Setokok.....	42
g. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wisata Pantai Setokok.....	44
h. Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan pantai Setokok.....	45
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Setokok.....	47
a. Partisipasi Ide-ide atau Buah Pikiran.....	48
b. Partisipasi Bentuk Dana (Uang).....	48
c. Partisipasi Bentuk Keterampilan.....	49
d. Partisipasi Bentuk Tenaga.....	50
D. Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Setokok.....	51
E. Manfaat Pengelolaan Objek Wisata Pantai Setokok yang Dirasakan Masyarakat Lokal.....	53
V. PEMBAHASAN.....	58
A. Bentuk Pengelolaan Wisata Pantai Setokok.....	58

B. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.....	59
C. Tingkat Partisipasi.....	60
D. Manfaat Pengelolaan Objek Wisata Pantai Setokok yang Dirasakan Masyarakat Lokal	61
VI. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian.....	29
2. Kategori Penilaian Bentuk Partisipasi	31
3. Kategori Penilaian Indikator Variabel.....	32
4. Data Jumlah Penduduk Kelurahan Setokok	34
5. Sarana/Prasarana Pantai Setokok	35
6. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur	36
7. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
8. Gambaran Umum Jumlah Tanggungan Keluarga.....	37
9. Sarana/Prasarana Pantai Setokok	40
10. Fasilitas wisata objek wisata pantai yang dikelola oleh pemilik lahan	43
11. Masyarakat Lokal yang bekerja di objek wisata pantai Setokok.....	46
12. Hasil Persentase responden berdasarkan empat bentuk partisipasi.....	52
13. Jumlah responden yang merasakan peluang dan kesempatan kerja.....	55
14. Jumlah responden yang merasakan peningkatan pendapatan	56
15. Jumlah responden yang merasakan perubahan kebiasaan masyarakat.....	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Penurunan wisatwan pada Maret 2020	2
2. Skema Kerangka Pemikiran	27
3. Presentase Bentuk Partisipasi Buah Pikiran.....	48
4. Presentase Bentuk Partisipasi Dana (Uang).....	49
5. Presentase Bentuk Partisipasi Keterampilan	50
6. Presentase Bentuk Partisipasi Tenaga.....	51
7. Manfaat pengelolaan objek wisata Pantai Setokok yang dirasakan Masyarakat.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Peta dan Lokasi Penelitian	67
2. Kuisisioner Penelitian	68
3. Data Responden Partisipasi Ide atau Buah Pikiran	72
4. Data Responden Partisipasi Dana (Uang)	73
5. Data Responden Partisipasi Keterampilan	74
6. Data Responden Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga	75
7. Surat Keterangan Domisili Usaha.....	76
8. Dokumentasi Sarana dan Prasarana Wisata Pantai Setokok	77
9. Dokumentasi pengambilan data Responden	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata telah memainkan peranan penting dalam perekonomian negara berkembang, terutama negara yang memiliki sumber pariwisata potensial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi yang cukup untuk menjadi daerah tujuan wisata internasional, baik yang berupa keindahan alam dan keanekaragaman budaya sehingga pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat memberikan masukan pendapatan finansial nasional yang tinggi. Sektor pariwisata yang mengalami perkembangan di Indonesia adalah wisata alam karena peran alam sebagai sumber daya alam dalam kepariwisataan sangat besar dan penting yang bisa dilihat dari klasifikasi jenis obyek dan daya tarik wisata dan termotivasi dari kunjungan wisatawan baik asing atau mancanegara maupun domestik atau nusantara.

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara, namun pada awal tahun 2020 terjadi pandemik *Covid-19* di hampir seluruh bagian dunia termasuk Indonesia, yang menyebabkan terpengaruhnya industri pariwisata, dampak yang dirasakan, tentu menjadi tantangan besar bagi pengelolaan obyek wisata, disamping memikirkan kualitas wisata demi eksistensi, juga harus memikirkan ekonomi masyarakat lokal yang ikut terlibat dalam pengelolaan wisata.

“Seperti yang terjadi di hampir semua negara dan juga di negara kita, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpuak oleh situasi yang terjadi saat ini”. (Wishnutama, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2020 mengalami penurunan tajam.



Gambar 1 Penurunan wisatwan pada Maret 2020

Dari data jumlah kunjungan tersebut tentunya tiap-tiap sektor pariwisata berfikir serta melakukan pembenahan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan wisata, baik swasta maupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang RI no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan dan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengatur serta mengelola wilayah darat, dan laut secara mandiri. Tujuannya agar tercapainya kesejahteraan dan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Kebijakan tersebut tentunya di berikan pula terhadap Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Batam merupakan kota kepulauan yang batas luas wilayahnya merupakan area pantai, memiliki luas wilayah 3.990,00 km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km² dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 pulau, 329 diantaranya telah bernama, termasuk didalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara. Dan tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pariwisata. Sebagai kota kepulauan maka wisata yang berada di kota Batam di dominasi oleh wisata bahari. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batam saat ini kota Batam memiliki beberapa wisata bahari 19 diantaranya dikelola secara swadaya, yang paling populer adalah wisata pantai, salah satunya yaitu pantai Setokok yang terletak di Pulau Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang tidak jauh dari pusat Kota Batam, setelah melewati jembatan Bareleng, sekitar 2 km kemudian pengunjung dapat menemukan

Pantai Setokok yang berlokasi dekat dengan pemukiman nelayan. (Dispuubar Kota Batam,2020).

Untuk mendukung pengelolaan wisata bahari yang baik dan mampu bersaing, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Berdasarkan penjelasan Sunaryo, (2013) mengilustrasikan pemangku kepentingan dalam pariwisata yaitu pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai tuan rumah atau pelaku pelaksana pariwisata, dan swasta sebagai penyedia industri atau pengembangan dan sebagai investor. Maka dari ketiga pemangku kepentingan pariwisata ini memiliki hubungan yang sangat erat. Pengelolaan wisata bahari pantai Setokok belum mendapatkan respon ataupun dukungan dari pemerintah, pengelolaan secara kekeluargaan sejak 2012 sampai sekarang belum mejamin pantai Setokok dapat bersaing dengan pantai lainnya seperti pantai Marina dan pantai Nongsa.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wisata, pemerintah daerah tidak dapat menyampingkan peran masyarakat, keterlibatan masyarakat di anggap penting, karena dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap wisata tersebut dan diharapkan dapat memberikan dampak kesejahteraan, sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan. Pembinaan kepariwisataan termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

Potensi yang dimiliki suatu daerah diharapkan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat namun hak tersebut akan terwujud apabila masyarakat berpartisipasi dalam memanfaatkan segala potensi wisata yang ada. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang seperti membuka jasa untuk wisatawan, serta ikut dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata, dengan demikian masyarakat mendapat peluang kerja, kesempatan berpartisipasi dan mengambil manfaat darinya, namun ketersediaan sumber daya alam menjadi sia-sia dan tidak berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi bagi suatu daerah dan masyarakat apabila ketersediaan sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat (Hakkiatul,2016).

Upaya dalam pengelolaan pariwisata Pantai Setokok ini, sejauh mungkin diarahkan agar masyarakat setempat jangan tersisih atau sekedar menjadi penonton atau tontonan saja. Pantai Setokok membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata secara langsung agar masyarakat setempat menjadi bagian

dari kegiatan pariwisata, dalam arti luas bukan hanya bukan hanya menjadi objek melainkan juga menjadi subjek sehingga masyarakat mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola objek wisata Pantai Setokok. Pengaruh ganda pariwisata harus mampu menyentuh hajat hidup masyarakat setempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. maka penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Bahari di Pantai Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk memberikan batasan dan pedoman arah penelitian maka perumusan masalah dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan wisata pantai Setokok ?
2. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pantai Setokok ?
3. Apa saja manfaat pengelolaan obyek wisata pantai Setokok yang dirasakan masyarakat lokal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan wisata pantai Setokok.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pantai Setokok
3. Untuk mengetahui manfaat pengelolaan obyek wisata pantai Setokok yang dirasakan masyarakat lokal?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kepentingan Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kepariwisataan melalui pengolahan data dan kunjungan langsung ketempat yang dijadikan obyek dalam penelitian.

2. Untuk Kepentingan Akademis

Diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi studi-studi selanjutnya dalam pengembangan ilmu wisata bahari.

3. Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan oleh Pemerintah daerah agar dapat lebih meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pariwisata

Spillane (1987) dalam Badrudin (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Menurut Pandit (1990), pariwisata adalah salah satu jenis industri yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Berdasarkan definisi pariwisata diatas maka disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan juga daerah tujuan (destinasi).
2. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan juga daya tarik wisata.
3. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pelaksana perjalananan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara.
5. Terdapat dampak yang ditimbulkan, khususnya daerah tujuan segi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia tuhan yang maha esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 4 UU No.10 Tahun 2009 dalam Muljadi, (2010: 33), tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Berdasarkan tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memajukan kebudayaan serta dapat melestarikan alam dan lingkungan. Bagi wisatawan sendiri penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk memberikan wadah rekreasi atau bertamasyarakat.

B. Potensi Pariwisata

Menurut Wiyono (2006) potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Menurut Prihadi (2004) potensi biasa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Sedangkan pengertian potensi wisata menurut Sukardi (1998:67), potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu : potensi wisata alam, potensi kebudayaan dan potensi wisata buatan manusia.

C. Wisata Bahari

Berikut pengertian wisata bahari menurut beberapa Ahli :

- a) Menurut Fandeli (1996) wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal landscape*).
- b) "Wisata bahari merupakan wisata yang banyak berkaitan dengan danau, pantai, atau laut. Wisata bahari adalah suatu kunjungan ke obyek wisata, khususnya untuk

menyaksikan keindahan lautan, menyelam dengan perlengkapan selam lengkap.”(Pandit, 1994:19).

- c) “Wisata bahari merupakan kesan yang penuh makna bukan semata-mata memperoleh hiburan dari berbagai suguhan atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan tapi juga diharapkan wisatawan dapat berpartisipasi langsung untuk menegmbangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir sehingga membentuk kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah pesisir di masa kini dan dimasa yang akan datang. Jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung .”(R.S Damardjati,2007:77).
- d) Wisata bahari adalah bentuk wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Konsep wisata bahari didasarkan pada keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimilikinya (Sero, 2010).

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wisata bahari merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan potensi keindahan alam yang tidak hanya menyuguhkan wisata bahari atau wisata bawah laut, namun juga termasuk didalamnya wisata pantai (darat/pesisir) sebagai suatu kegiatan yang bersifat rekreatif, edukatif dan sejenisnya.

Dalam hubungan dengan aktivitas wisata alam pantai dan bahari maka secara umum kegiatan wisata di objek wisata alam dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu wisata perairan atau wisata bahari; dan wisata daratan.

Aktivitas bentang laut, yaitu berenang, memancing, bersampan yang meliputi berdayung, atau berlayar, menyelam yang meliputi diving dan snorkeling, berselancar yang meliputi selancar air dan selancar angin serta berperahu parasut (parasailing). Aktivitas bentang darat, yaitu rekreasi berupa olahraga susur pantai, bersepeda, panjat tebing pada dinding terjal pantai dan menelusuri gua pantai. Selain itu dapat pula dilakukan aktivitas bermain layang–layang, berkemah, berjemur, berjalan– jalan melihat pemandangan, berkuda atau naik dokar pantai.

Fokus utama kebijakan pengembangan pariwisata bahari sebagaimana disebutkan oleh Ardiansyah, (2013) adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana publik;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola pariwisata bahari;

- 3) Mengembangkan sistem pendataan dan informasi yang lengkap, sehingga memudahkan wisatawan mendapatkan informasi dan akses cepat, mudah serta murah;
- 4) Mengembangkan aktivitas ekonomi non-pariwisata seperti industri kerajinan, perikanan, restoran, dan jasa angkutan laut;
- 5) Meningkatkan jaminan dan sistem keamanan bagi wisatawan;
- 6) Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kalangan investor;
- 7) Mengembangkan model pengelolaan pariwisata bahari yang mampu menjaga kelestarian ekosistem laut dan budaya masyarakat lokal.

Obyek wisata pantai adalah elemen fisik dari pantai yang dapat dijadikan lokasi untuk melakukan kegiatan wisata, obyek wisata tersebut yaitu :

- a. Pantai, merupakan daerah transisi antara daratan dan lautan. Pantai merupakan primadona obyek wisata dengan potensi pemanfaatan, mulai dari kegiatan yang pasif sampai aktif.
- b. Permukaan laut, terdapatnya ombak dan angin sehingga permukaan tersebut memiliki potensi yang berguna dan bersifat rekreatif.
- c. Daratan sekitar pantai, merupakan daerah pendukung terhadap keadaan pantai, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga darat yang membuat para pengunjung akan lebih lama menikmatinya.

Menurut simond (1978), pantai dapat dibagi menjadi berbagai wilayah, yaitu:

- a) *Beach*, yaitu batasan antara daratan dan lautan. Biasanya berupa pantai berpasir dan landai.
- b) *Dune*, yaitu daerah yang lebih tinggi dari *beach*. Biasanya berupa hamparan pasir yang permukaan bergelombang atau berubah secara perlahan karena aliran laut.
- c) *Costal*, yaitu daerah yang secara priodik digenangi air yang merupakan gabungan antara *beach* dan *dune*.

Dari beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pantai merupakan "lokasi" yang menjadi batasan antara daratan dan lautan. Bentuk-bentuk pantai berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh perbedaan proses yang ada di lokasi tersebut seperti pengikisan, pengangkutan dan pengendapan yang disebabkan karena adanya gelombang, arus dan angin yang berlangsung secara terus menerus sehingga membentuk daerah pantai.

D. Komponen-Komponen Wisata

Menurut Inskeep (1991) dalam Suprpto Aris (2005), di berbagai macam literatur dimuat berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata

Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.

2. Akomodasi

Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.

3. Fasilitas dan pelayanan wisata

Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya: restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, pelayanan pribadi (seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai).

4. Fasilitas dan pelayanan transportasi

Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.

5. Infrastruktur lain

Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex, faksimili, dan radio). Pembangunan sarana dan prasarana wisata dapat meningkatkan daya dukung pengembangan suatu wisata, dengan mempertimbangkan kondisi dan lokasi

obyek wisata akan meningkatkan aksesibilitas yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri (Tuwo, 2011).

6. Elemen Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan; menyusun strategi marketing dan program promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan penanaman modal bagi sektor publik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan.

Berdasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009, paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu :

a. Pihak Pemerintah atau Pemerintahan Daerah

Di banyak Negara termasuk di Indonesia, kedudukan pihak Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah masih memiliki peran dan fungsi sangat penting dan strategis dalam pengembangan industri kepariwisataan di suatu destinasi. Di Indonesia sendiri, peran Pemerintah (Nasional) disamping masih berfungsi utama sebagai regulator utamanya dalam menentukan norma, standard, prosedur dan kriteria pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan.

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain (industri dan masyarakat) untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No.10 tahun 2009 (Bambang Sunaryo, 2013 : 116-117).

Peranan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata sangat menentukan berkembang tidaknya suatu objek wisata, contohnya dapat kita lihat dalam hal penyediaan infrastruktur dan memperluas jaringan kerja aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar Negeri. Selain itu pemerintah juga berpartisipasi dalam hal penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan.

b. Swasta / Industri Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan mulai dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat daerah tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri kepariwisataan yang berperan di *private sector*.

Jiwa bisnis dari para pelaku usaha kepariwisataan di private sector ini utamanya memandang bahwa usaha pembangunan kepariwisataan adalah sebagai kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan memperoleh keuntungan melalui pengadaan barang dan penyedia jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan atau pasar pariwisata. Misalnya dalam kegiatan usaha penyediaan sarana akomodasi, transportasi, jasa pemanduan, atraksi dan daya tarik wisata, kawasan pariwisata, restoran, souvenir / cinderamata maupun penyedia jasa yang lain yang terkait dengan kepariwisataan.

c. Pihak Masyarakat

Masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah (hosting) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Umumnya masyarakat telah memposisikan kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayahnya sebagai peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan serta nilai tambah lain diluar aspek ekonomi seperti kebanggaan identitas, kebersihan, keindahan dan kualitas lingkungan yang semakin baik (Bambang Sunaryo,2013 :118-119).

E. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Secara garis besarnya partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang pada suatu proses kegiatan. Pengertian tersebut selaras dengan pengertian dalam kamus besar sosiologi yang disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Berdasarkan pendapat Mikkelsen terkait beberapa poin definisi partisipasi dalam Puspitasari (2014: 124-125), dapat dipahami bahwa partisipasi ada pada motif sukarela, adanya penyertaan pikiran dan emosi, adanya kepekaan dan adaptasi secara aktif untuk memunculkan komunikasi

antar para pihak yang terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat. Partisipasi pada praktiknya memungkinkan warga masyarakat untuk terlibat dalam berbagai ajang yang mempengaruhi kehidupannya sehingga mereka juga memiliki akses terhadap sumber daya maupun institusi. Partisipasi dapat diartikan juga sebagai bentuk keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non-fisik dari seorang individu atau masyarakat.

Santosa dalam Sulistiyorini (2015:73) menyatakan bahwa “partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Definisi tersebut memberi kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, dan partisipasi juga dapat disebut sebagai dorongan bagi manusia atau individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Walgito, 2003 (dalam Ahmad Nawawi, 2013:104) partisipasi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri tiap-tiap individu di dalamnya terdapat proses penekanan terhadap stimulus yang diterima atau dirasakan oleh alat indera individu dan proses ini selalu berlangsung setiap saat, karena dalam partisipasi itu merupakan aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.

Siti Irene (2011:64) dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* dengan mengutip pendapat dari Huneryear dan Hecman mengenai pengertian partisipasi, mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu atau seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Jadi partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut. Menurut Isbandi dalam Riskayana (2012:181). Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan atau proses pelaksanaan, pemilihan, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai hasrat untuk menyatu dengan

sesama dalam lingkungan alam di sekitarnya dengan menggunakan pikir, naluri, perasaan, keinginan. Manusia akan memberikan reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungan. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Masyarakat tidak muncul begitu saja seperti sekarang ini, tetapi ada perkembangan yang dimulai dari masa lalu sampai saat ini dan terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut. Masyarakat kemudian berkembang mengikuti perkembangan jaman sehingga kemajuan yang dimiliki masyarakat sejalan dengan perubahan yang terjadi secara global. Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2006:22) mendefinisikan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari tata cara, kebiasaan, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Linton dalam Hartomo, dkk (2008:88) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Menurut Selo Soemardjan dalam Soekanto (2006:22) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka memiliki kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Soerjono Soekanto dalam Syani (2012:32), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a) Manusia yang hidup bersama.
- b) Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Ciri-ciri tersebut selaras dengan definisi masyarakat yang dikemukakan oleh Hartomo, dkk (2008:90), bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dan memiliki aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Jadi yang menjadi unsur dari masyarakat adalah :

- a. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya dan bukan mengumpulkan binatang.
- b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
- c. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka, untuk maju kepada satu

tujuan yang sama.

Dari beberapa pendapat diatas yang mengemukakan definisi tentang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah sekelompok manusia yang hidup dan saling berhubungan, terdiri dari beraneka ragam bentuk budaya yang dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, agama, ras, dan yang lainnya. Kemudian membentuk kelompok yang lebih besar dan hidup teratur oleh aturan (undang-undang) serta adat yang ada di dalamnya, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat sangat identik dengan berbagai macam situasi dan keadaan yang berbeda-beda maka sering terjadi perbedaan pendapat dengan masyarakat lainnya. Hal ini yang menjadikan masyarakat memiliki hubungan yang penting dengan lingkungan di sekitarnya.

c. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Timothy (1999), dalam Made Heny Urmila Dewi, 2013: 132) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan, pengelolaan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Partisipasi masyarakat hakikatnya bukan hanya mendorong terjadinya proses penguatan kapasitas masyarakat lokal, tetapi merupakan sebuah mekanisme guna meningkatkan pemberdayaan bagi warga untuk terlibat dalam pembangunan secara bersama. Dalam konteks pembangunan pariwisata, partisipasi masyarakat penting untuk terus didorong guna mendistribusi keuntungan-keuntungan dari kegiatan kepariwisataan yang berlangsung kepada masyarakat secara langsung. Semangat desentralisasi dan pemberian kewenangan penuh bagi warga untuk mengelola pariwisata di daerahnya merupakan hal mutlak untuk terwujudnya pariwisata berbasis masyarakat (Kawistara, 2012:228).

Brohman dalam Fariborz Aref dan Ma'rof B Redzuan (2008:937) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai alat untuk memecahkan masalah utama pariwisata di negara berkembang. Pelaksanaan pengelolaan objek wisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pariwisata, dan evaluasi, karena masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata menjadi salah satu kunci dalam kepariwisataan. Dengan demikian, kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu

mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diperlakukan sebagai inti dalam pengelolaan karena sesungguhnya masyarakat lokal yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

Masyarakat lokal merupakan “pemilik” langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya dari objek wisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada di tangan mereka. Masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan perencanaan. Masyarakat asli daerah sekitar objek wisata menjadi bagian penting dalam pengelolaan objek wisata karena masyarakat lokal yang memahami keadaan daerah tersebut dan mampu memberi informasi yang sangat berharga seperti potensi dan permasalahan yang dihadapi di daerahnya.

Selanjutnya, masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya (Bambang Sunaryo, 2013 : 78).

Pembangunan pariwisata melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas sampai lapisan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa. Semua diharapkan turut membantu dan menunjang usaha pembangunan pariwisata. Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif (Suwantoro, 1997).

d. Bentuk Partisipasi

Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), misalnya uang, harta benda dan keterampilan. Sedangkan yang kedua

adalah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak), yaitu berupa partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial dan partisipasi representatif. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk partisipasi masyarakat menurut Pasaribu dan Simandjuntak (1989) terdapat empat buah bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk kegiatan meliputi :

a) Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi yang menyumbangkan ide, pendapat, gagasan atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan atau program dan untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

b) Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga atau usaha fisik untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

c) Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda yaitu partisipasi yang dapat diberikan dalam bentuk harta dan benda adalah sumbangan berupa materi yang digunakan untuk membangun kios yang menjual makanan dan minuman, memperbaiki fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata dan lain-lain.

d) Partisipasi Keterampilan

Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

e. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi setiap individu anggota kelompok dapat diketahui dengan melakukan penilaian terhadapnya, yaitu; Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut, frekuensi kehadiran, sumbangan yang diberikan, keanggotaan dalam kepengurusan, kegiatan dalam tahap program yang direncanakan, dan keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan. Sedangkan tingkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat tidak ada (none), tidak langsung (indirect), konsultatif (consultative), terbagi (shared) dan tingkat pengendalian penuh (full control) (Surotinojo, 2009).

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo (dalam Nisrina, 2018) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kedalam tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
4. Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Menurut Aprilia Theresia (2014) ada lima tingkatan dalam partisipasi, yaitu:

1. Memberikan informasi, Dalam konteks ini masyarakat memberikan informasi sebagai bahan masukan dalam sebuah kegiatan.
2. Konsultasi, Pada tahap ini masyarakat mampu menyampaikan pendapatnya, mendengar yang baik untuk memberikan umpan balik akan tetapi dalam tingkatan partisipasi ini masyarakat tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama, pada tingkatan ini masyarakat memberikan dukungan terhadap gagasan, pilihan-pilihan serta mampu mengembangkan peluang untuk mengambil keputusan.
4. Bertindak bersama, dalam tingkatan ini masyarakat tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan akan tetapi juga ikut terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan. Memberikan dukungan, pada tingkatan ini masyarakat menawarkan pendanaan, nasihat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

f. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi

masyarakat dapat didekati melalui berbagai disiplin keilmuan diantaranya yaitu: (1) Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangnya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan yang dirasakan. (2) Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau reward yang dapat diharapkan. (3) harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh. Manfaat itu sendiri dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun manfaat non- ekonomi (yang dapat dibedakan dalam: kekuasaan, persahabatan/ kebersamaan, dan prestasi).

Menurut Aprelia Theresia (2014) ada beberapa faktor yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu :

a) Kemauan

Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemauan untuk berpartisipasi ini ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat guna membangun dan memperbaiki kehidupannya.

b) Kemampuan

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak berarti apabila masyarakat sendiri tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

c) Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya kesempatan ini merupakan faktor pendorong untuk tumbuhnya kemauan yang pada akhirnya akan menentukan kemampuannya.

Siti Irene (2011:72) berpendapat bahwa terdapat dua dimensi penting dalam partisipasi masyarakat. Dimensi yang pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Berdasarkan latar belakangnya dan tanggungjawabnya masyarakat diklarifikasikan sebagai berikut : (1) penduduk setempat (2) pemimpin masyarakat (3) pegawai pemerintahan (4) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.

Semua pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan suatu program harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka.

Dimensi yang kedua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Ini penting karena untuk mengetahui hal-hal seperti : (1) apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat, (2) apakah dorongan partisipasi itu sukarela ataukah paksaan, (3) saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam dalam berisi individu atau kolektif, dalam organisasi formal ataukah informal, dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil, (4) durasi partisipasi (5) ruang lingkup partisipasi, apakah sekali atau seluruhnya, sementara atau berlanjut dan meluas, dan (6) memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan. Pemahaman terhadap kelangsungan kedua dimensi partisipasi diatas terwujud dari suatu dinamika dan akibat dari partisipasi. Jika diterapkan dengan tepat maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tentang “siapa” yang berpartisipasi dalam aktivitas “apa” yang dipertimbangkan dalam partisipasi.

F. Konsep Objek Wisata

Dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah keseluruhan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, dan mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang singkat atau sementara. Sedangkan pariwisata merupakan proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya dengan tujuan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain yaitu untuk sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Suswantoro. 1997:3)

Dalam kepariwisataan terdapat beberapa aktor yang memiliki peran untuk menggerakkan sistem wisata. Aktor wisata tersebut dikelompokkan menjadi tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Yang termasuk dari masyarakat adalah masyarakat lokal yang ada di sekitar destinasi wisata, sebagai penghuni atau pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal untuk kegiatan wisata. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai pemerintah desa. (Pitana, 2005 : 23).

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kegiatan wisata merupakan kegiatan yang bisa memberikan respon positif yang menyenangkan dan dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan, memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga menimbulkan kesan yang mendalam. Pengertian objek wisata adalah segala objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk dapat mengunjunginya, misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah, kebudayaan dan pusat-pusat rekreasi modern (Karyono, 1997:27). Objek wisata dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Objek wisata alam merupakan tempat-tempat hiburan, beristirahat, dan rekreasi guna untuk memulihkan kembali kesehatan jasmani dan rohani. Wisata alam berupa pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, lingkungan hidup flora dan fauna, dan lain-lain.
- b. Objek wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, seni dan budaya. Misalkan seperti situs budaya, bersejarah, dan lain- lain.
- c. Objek wisata buatan merupakan suatu tempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk dijadikan tempat wisata, lalu sengaja dibangun oleh manusia.

UU RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, menjelaskan bahwa objek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata, dalam undang- undang di atas, yang termasuk objek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka.
- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta, wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri, dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat- tempat ziarah, dan lain-lain.
- d. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata yaitu meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

Objek wisata tentu saja memiliki daya tarik wisata yang dapat mempengaruhi dan menjadi bahan pertimbangan bagi wisatawan untuk menentukan lokasi berwisata. Atraksi wisata, aksesibilitas, keindahan alam, sikap ramah pelaku wisata, dan kelebihan lain yang terdapat di lokasi wisata menjadi faktor pendorong wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Dalam penelitian ini, Objek wisata Pantai Setokok memiliki keindahan pasir putih dan unik dimana pasir tersebut akan muncul pada saat air surt sehingga pengunjung dapat menikmati pasir putih seolah-olah berada di tengah laut, serta pantai Setokok juga memiliki fasilitas yang tersedia.

G. Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997: 5) mendefenisikan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Definisi pengelolaan dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut : (1) proses, langkah pembuatan mengelola, (2) proses melakukan kegiatan atau perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga manusia, (3) proses yang membentuk merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, (4) proses yang memberi pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian suatu tujuan, dan (5) Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan ilmu maupun seni supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan (Hayun, 2001). Pemerintah mempunyai tanggungjawab atas pengelolaan objek wisata, namun masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata agar dapat mencapai tujuan. Pengelolaan merupakan salah satu langkah dalam suatu pengembangan, pengelolaan lebih berfokus dalam pelaksanaan kegiatan dan manage proses dari awal kegiatan sampai akhir dari suatu kegiatan.

Berdasarkan penjelasan Sunaryo, (2013) mengilustrasikan pemangku kepentingan dalam pariwisata yaitu pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai tuan rumah atau pelaku pelaksana pariwisata, dan swasta sebagai penyedia industri atau pengembangan dan sebagai investor.

Menurut Pitana dalam (Baskara, dkk, 2017:6) pada prinsipnya pengelolaan pariwisata harus menitik beratkan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan objek wisata secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara atau upaya upaya yang dilakukan untuk pengembangan objek wisata, serta bertujuan untuk kesinambungan yang muncul dari kepedulian terhadap pelestarian aset pariwisata dan kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat (pariwisata tidak dikuasai oleh pihak luar).

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Menurut Cox dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta (2009:81) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan Special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- 2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal
- 5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

H. Dampak Pariwisata

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994), dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik secara positif ataupun negatif. Sedangkan secara ekonomi dampak mempunyai artian pengaruh sebuah penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara dalam bukunya Otto Soemarwoto (2007) mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut bisa bersifat alami ataupun biologi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan akibat yang timbul akibat adanya sebuah kegiatan/aktivitas yang bisa bersifat negatif ataupun positif.

Dampak positif ataupun negatif dapat dilihat dari sisi sosial, ekonomi, ataupun perubahan lingkungan sekitar, dampak tersebut dapat berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan, perubahan sarana dan prasarana dari lingkungan terjadinya kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan pariwisata dapat berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan wilayah (Anisiewicz, 2014; Studzienski, 2015). Dampak ekonomi kegiatan pariwisata alam tersebut diartikan sebagai manfaat atau kontribusi produk wisata berbasis alam terhadap ekonomi di suatu wilayah. Dampak tersebut dapat berupa hasil dari penjualan produk wisata (retribusi, hotel, *campground*, restoran, transportasi, atraksi dll). Selain itu juga bisa berbentuk pendapatan masyarakat, peluang pekerjaan, penerimaan bagi pemerintah daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi (Frechtling, 1987 dalam Dwi Bruri 2014).

Menurut Yoeti terdapat beberapa faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara sebagai dampak adanya kegiatan pariwisata, diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai dampak akibat dibangunnya sarana dan prasarana demi pengembangan pariwisata daerah tersebut, sehingga memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas ekonominya dari suatu tempat menuju tempat lain, baik dalam satu wilayah negara tertentu ataupun dalam kawasan internasional.
- b. Meningkatkan industri-industri kreatif yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Ekonomi kreatif dan sektor pariwisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh, dan jika dikelola dengan baik keduanya dapat saling bersinergi satu sama lain. Jika dijelaskan lebih lanjut, kreativitas akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif baik di bidang kerajinan ataupun kuliner, hal itu secara tidak langsung akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah wisata lainnya. Dari segi wisatawanpun mereka akan

merasa lebih tertarik berkunjung ke daerah objek wisata yang memiliki produk khas untuk kemudian dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

- c. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran.
- d. Meningkatkan permintaan terhadap kerajinan-kerajinan yang terdapat di daerah lokasi wisata.
- e. Memperluas barang-barang lokal untuk bisa lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman.
- f. Meningkatkan devisa negara sehingga mengurangi beban defisit neraca pembayaran.
- g. Membuka lapangan pekerjaan serta kesempatan untuk berusaha.
- h. Meningkatkan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pajak dan peningkatan pendapatan nasional.
- i. Memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan.

I. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya turut membantu dalam memahami serta menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian serupa dapat dilihat pada penjelasan berikut :

Penelitian Ahmad Nawawi, 2013 berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Depok di Desa Kretek Parangtriris”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan wisata Pantai Depok dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok.

Penelitian selanjutnya berjudul “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Pantai di Kecamatan Jerowaru” oleh Hakkiatul Lutpi, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru.

Penelitian selanjutnya berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Potensi Desa di Kampung Wisata situ Gede Bogor” oleh Popy Marysya dan Siti Amanah, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis potensi desa di kawasan wisata Situ Gede, Bogor

Penelitian Selanjutnya Berjudul “Partisipasi masyarakat dalam pengembangan

obyek wisata alam air terjun jumog dan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat (studi di desa berjo kecamatan ngargoyoso kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah)” oleh Eko Riyani (2018). Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan obyek wisata dan Dampak pembangunan obyek wisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

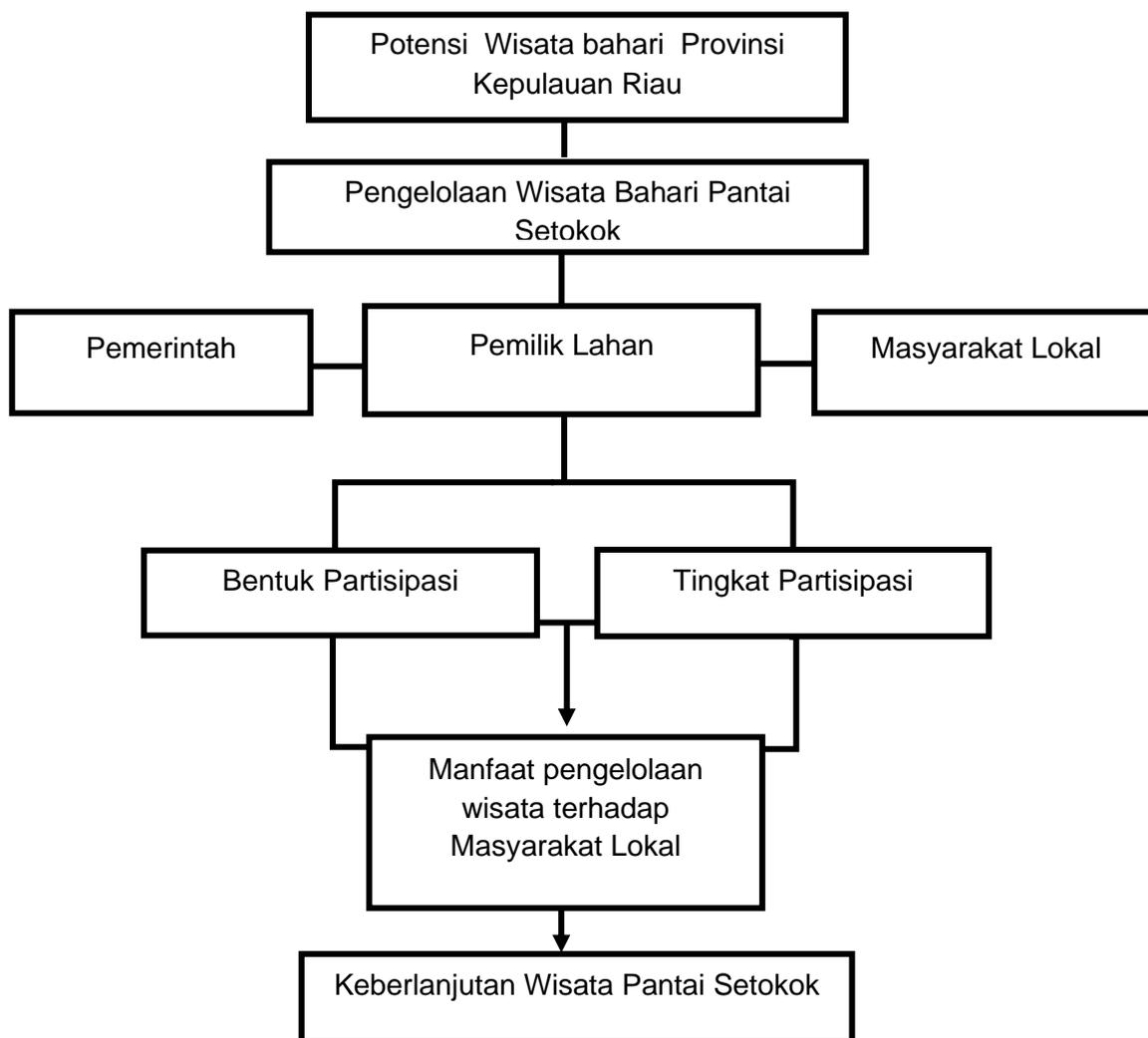
J. Kerangka Berfikir

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan budaya dan pariwisata yang banyak dan beraneka ragam, beberapa diantaranya memiliki kulaitas dan daya tarik yang tinggi yang telah diandalkan sebagai sektor yang potensial meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus yang kesemuanya itu dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat yang tentunya dapat membantu dalam menghasilkan pendapatan negara khususnya pendapatan daerah. Wisata bahari di provinsi Kepulauan Riau.

Pantai Setokok, yang terletak di Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam saat ini dikelola swasta dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal, dimana pemilik lahan haji Herman sebagai ketua, kemudian mempercayakan menantunya atas nama bapak Rio Martvalcon sebagai sekretaris dan sebagai bendahara ibu Sumiati istri dari bapak Rio Martvalcon, dalam implementasi pengelolaan pantai Setokok kerap dibantu oleh anggota keluarga yang lain dan masyarakat lokal kampung Setokok. Pengelolaan pantai setokok merupakan pengelolaan secara mandiri, yang melibatkan peran serta masyarakat lokal.

Untuk mendukung pengelolaan wisata bahari yang baik dan mampu bersaing, dibutuhkan peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Berdasarkan penjelasan Sunaryo, (2013) mengilustrasikan pemangku kepentingan dalam pariwisata yaitu pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai tuan rumah atau pelaku pelaksana pariwisata, dan swasta sebagai penyedia industri atau pengembangan dan sebagai investor. Maka dari ketiga pemangku kepentingan pariwisata ini memiliki hubungan yang sangat erat.

Dalam mewujudkan pengelolaan dan pengembangan wisata yang mampu bersaing, dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bentuk partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat. Dari bentuk dan tingkat partisipasi tersebut dapat melahirkan tujuan peneglolaan wisata bahari yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat serta keuntungan kepada masyarakat lokal khususnya dalam segi sosial dan ekonomi. Kerangka pikir penelitian ditunjukkan pada skema berikut :



Gambar 2 Skema Kerangka Pemikiran